PARHOBAS FISIPOL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol.1, No.1 Bulan Januari Tahun 2026, Hal. 140-145

PERAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN RESES

Sara Agustin Simamora[1] Nomela Rismawati br sitorus[2] Betrys Clara Gultom[3] Fani Anastasia Sitohang[4] Miwanli Rajagukguk [5] Artha Lumban Tobing [6]
[1,2,3,4,5,6] Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

email korespondensi: sara.agustin@student.uhn.ac.id[1]
Email: sara.agustin@student.uhn.ac.id[1], nomela.rismawati@uhn.ac.id[2], betrys.clara@student.uhn.ac.id[3], fani.anastasia@student.uhn.ac.id[4], miwanli.rajagukguk@student.uhn.ac.id.[5], Artha.tobing@uhn.ac.id [6]

Diajukan :22/12/2025
Direvisi : 29/12/2025
Diterima : 05/01/2026

ABSTRACT

Recess activities constitute a crucial instrument within Indonesia's democratic system, functioning as a communicative bridge between the public and their representatives in the legislative body. This article aims to examine the role of the Regional House of Representatives (DPRD) of North Sumatra Province in absorbing and articulating public aspirations through recess activities as a form of community engagement. The study employs a descriptive qualitative method, with data collected through observation, documentation, and literature review related to the implementation of legislative recess at the regional level. The findings indicate that the DPRD of North Sumatra performs a strategic role in gathering public input, both formally through face-to-face meetings in electoral districts and informally through culturally grounded dialogues. The aspirations collected primarily concern infrastructure development, public facilities, economic issues, and education. Although the implementation of recess is generally considered effective in identifying real community needs, significant challenges remain, particularly budgetary and time constraints, which prevent all public proposals from being immediately accommodated in public policy. In conclusion, optimizing the DPRD's role during recess periods requires stronger coordination with local government institutions and greater transparency in the follow-up of public aspirations to sustain public trust in the legislative institution.

Keywords: *Recess, Public Aspirations, North Sumatra DPRD, Public Policy.*

ABSTRAK

Kegiatan reses merupakan instrumen krusial dalam sistem demokrasi di Indonesia yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat di lembaga legislatif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam menyerap dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan studi pustaka dari berbagai literatur terkait pelaksanaan reses di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Provinsi Sumatera Utara menjalankan peran strategis dalam menjaring aspirasi baik secara formal melalui pertemuan tatap muka di daerah pemilihan (dapil) maupun secara informal melalui dialog kultural. Aspirasi yang diserap meliputi kebutuhan infrastruktur, sarana publik, ekonomi, dan pendidikan. Meskipun secara umum pelaksanaan reses dinilai cukup efektif dalam mengidentifikasi kebutuhan riil di lapangan, terdapat tantangan signifikan berupa keterbatasan anggaran dan waktu yang menyebabkan tidak semua usulan masyarakat dapat segera diakomodasi dalam kebijakan publik. Kesimpulannya, optimalisasi peran DPRD dalam reses memerlukan koordinasi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah dan transparansi dalam tindak lanjut aspirasi agar kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tetap terjaga.

Kata Kunci*:* Reses, Aspirasi Masyarakat, DPRD Sumatera Utara, Kebijakan Publik.

PENDAHULUAN

Demokrasi memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah guna menentukan arah kebijakan publik. Di tingkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peranan vital sebagai lembaga perwakilan yang bertugas menyuarakan kepentingan rakyat dalam perumusan kebijakan daerah. Salah satu instrumen utama yang digunakan untuk menjembatani komunikasi ini adalah kegiatan reses, di mana anggota dewan turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing guna memastikan suara masyarakat tingkat bawah terdengar dalam proses pengambilan keputusan. (Kurniasih & Rusfiana, 2021)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewajiban moral dan politis untuk menghimpun konstituennya secara rutin. Masa reses ini menjadi waktu bagi anggota parlemen untuk bekerja di luar gedung dewan, bertemu dengan pemilih, dan mendengarkan keluhan terkait isu-isu publik yang mendesak di wilayah mereka. Melalui reses, diharapkan terjadi sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dengan program pembangunan yang direncanakan pemerintah agar setiap kebijakan yang lahir tepat sasaran. (Hamidin et al., 2024)

Di Provinsi Sumatera Utara, penyerapan aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja atau reses diarahkan untuk mewujudkan sasaran politik yang selaras dengan kebijakan pemerintah daerah. Strategi penyerapan ini sering kali dilakukan melalui dialog tatap muka yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat guna memastikan setiap masukan bersifat representatif. Hal ini penting mengingat beragamnya tantangan pembangunan di Sumatera Utara, mulai dari isu infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi yang memerlukan penanganan komunikatif yang intensif. (Susanto et al., 2021)

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan reses sering kali menghadapi kendala dalam implementasinya di lapangan. Masalah seperti keterbatasan waktu, kurangnya partisipasi masyarakat yang merata, serta kendala anggaran sering kali menghambat transformasi aspirasi menjadi kebijakan nyata. Sering ditemukan adanya ketidakselarasan antara apa yang diusulkan masyarakat dengan apa yang akhirnya diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga manfaatnya belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. (Wenas et al., 2021)

Oleh karena itu, peran DPRD Sumatera Utara tidak hanya berhenti pada tahap pendengaran aspirasi, tetapi juga pada pengawalan hasil reses tersebut hingga ke tahap paripurna dan implementasi kebijakan. Pengabdian kepada masyarakat melalui reses harus dipandang sebagai proses berkelanjutan untuk menyejahterakan masyarakat melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang optimal. Peranan anggota dewan yang optimal, baik secara formal maupun informal melalui pendekatan kultural, sangat menentukan seberapa besar manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat dari kegiatan politik ini. (Nugraha, 2022)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data primer melalui observasi partisipatif pada kegiatan reses serta wawancara mendalam dengan anggota dewan dan konstituen.(Hamidin et al., 2024)

Penggunaan metode kualitatif ini memungkinkan eksplorasi yang lebih komprehensif terhadap strategi komunikasi politik dan interaksi sosial yang terjadi di daerah pemilihan guna memastikan data yang diperoleh memiliki validitas yang tinggi sesuai dengan realitas di lapangan. (Kurniasih & Rusfiana, 2021)

Teknik analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, serta penarikan kesimpulan untuk menjawab tujuan penelitian. Selain data lapangan, penelitian ini juga mengandalkan studi dokumentasi berupa laporan resmi hasil reses dan regulasi terkait guna memperkuat hasil analisis.(Nugraha, 2022)

Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan teknik triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi dari berbagai pihak terkait, sehingga hambatan-hambatan dalam penyerapan aspirasi seperti kendala anggaran dan partisipasi publik dapat terpetakan secara akurat. (Dilla et al., 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang dihimpun, peran DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam menyerap aspirasi masyarakat dilaksanakan melalui beberapa mekanisme strategis yang terstruktur. Secara formal, aspirasi dijaring melalui pertemuan tatap muka di daerah pemilihan (dapil) selama masa reses, di mana anggota dewan mendengarkan langsung keluhan terkait sarana publik, irigasi, perbaikan jalan, hingga isu pendidikan. Proses ini merupakan bentuk artikulasi kepentingan yang memungkinkan masyarakat menyampaikan secara langsung kebutuhan mendesak di wilayah mereka kepada wakilnya di parlemen. (Kurniasih & Rusfiana, 2021)

Selain jalur formal, aspirasi juga disampaikan melalui jalur informal yang meliputi dialog dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), kegiatan partai, atau pendekatan kultural yang dilakukan secara mandiri oleh anggota dewan. Pendekatan informal ini sering kali lebih efektif dalam menjangkau kelompok masyarakat yang enggan hadir dalam forum formal, sehingga jangkauan penyerapan aspirasi menjadi lebih luas dan representatif. Upaya proaktif dari anggota dewan dalam membangun komunikasi di luar masa reses resmi sangat menentukan kualitas hubungan antara konstituen dan wakil rakyat. (Nugraha, 2022)

Hasil penelitian oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Labuhanbatu aktif menjaring aspirasi masyarakat melalui berbagai cara, seperti kegiatan reses, dialog publik, serta forum-forum diskusi. Melalui jalur-jalur ini, para anggota dewan dapat mendengar secara langsung kebutuhan, keluhan, dan harapan warga. Selain itu, DPRD juga menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif agar pokok-pokok pikiran hasil penyerapan aspirasi tersebut dapat dimasukkan ke dalam program kerja pemerintah. Langkah ini penting untuk menciptakan keselarasan dan kerja sama yang baik antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.(Astuti & Febrian, 2025)

Strategi penyerapan aspirasi di Sumatera Utara juga melibatkan pemanfaatan kunjungan kerja untuk memastikan bahwa isu-isu spesifik di setiap dapil dapat diidentifikasi dengan akurat. Dalam praktiknya, keterlibatan kelompok masyarakat dalam dialog dua arah menjadi kunci keberhasilan penangkapan aspirasi yang bersifat riil dan mendasar. Masyarakat cenderung memberikan respon positif ketika mereka merasa diberikan ruang yang cukup untuk berpartisipasi dalam merumuskan kebutuhan pembangunan di daerahnya. (Dilla et al., 2020)

Efektivitas dari peran DPRD ini dapat diukur dari sejauh mana aspirasi tersebut mampu diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang nyata. Di wilayah Sumatera Utara, khususnya pada daerah pemilihan tertentu, aspirasi yang paling dominan muncul berkaitan dengan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan serta bantuan modal usaha bagi UMKM. Penyerapan aspirasi yang efektif tidak hanya berhenti pada tahap pencatatan usulan, tetapi harus berlanjut pada pengintegrasian masukan tersebut ke dalam rencana kerja pemerintah daerah (Hamidin dkk., 2024).

Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua usulan masyarakat dapat terakomodasi dalam kebijakan anggaran daerah. Fenomena ini seringkali disebabkan oleh keterbatasan anggaran pemerintah daerah yang tidak sebanding dengan tingginya volume usulan yang masuk selama masa reses. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara harapan masyarakat dengan realisasi program yang dijalankan, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. (Wenas et al., 2021)

Masalah klasik lainnya yang ditemukan dalam pelaksanaan reses di Sumatera Utara adalah dominasi usulan pada sektor fisik dibandingkan sektor pemberdayaan ekonomi atau sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan infrastruktur dasar masih menjadi prioritas utama masyarakat, namun di sisi lain mengisyaratkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat juga mengusulkan program pembangunan sumber daya manusia. Efektivitas program reses sangat bergantung pada bagaimana anggota dewan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ruang lingkup kewenangan DPRD.(Dilla et al., 2020)

Agar kegiatan reses benar-benar berfungsi sebagai jaring aspirasi yang efektif, diperlukan koordinasi yang kuat antara DPRD dengan pihak eksekutif dalam menetapkan

skala prioritas pembangunan. Aspirasi yang telah diserap harus dipilah berdasarkan tingkat urgensi dan ketersediaan anggaran daerah agar dapat direalisasikan. Tanpa adanya sinkronisasi yang baik antara hasil reses dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), usulan masyarakat hanya akan menjadi tumpukan dokumen tanpa tindak lanjut nyata. (Kurniasih & Rusfiana, 2021)

Hasil reses sering kali terancam hanya menjadi dokumen formalitas belaka jika tidak dikawal secara ketat dalam rapat-rapat komisi dan rapat paripurna. Anggota dewan memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan hasil serap aspirasi tersebut agar masuk dalam nota kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Pengawalan aspirasi dari tingkat dapil hingga ke meja perundingan anggaran adalah tahapan paling krusial dalam siklus kebijakan daerah (Nugraha, 2022).

Penguatan fungsi pengawasan dewan juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program-program yang merupakan hasil aspirasi masyarakat benar-benar dilaksanakan oleh dinas terkait. DPRD harus aktif memantau implementasi program di lapangan guna memastikan kualitas pekerjaan dan ketepatan sasaran bantuan yang diberikan. Fungsi pengawasan yang lemah akan mengakibatkan aspirasi yang sudah dianggarkan tidak memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. (Wenas et al., 2021)

Secara keseluruhan, optimalisasi peran DPRD Sumatera Utara dalam menyerap aspirasi memerlukan inovasi dalam metode komunikasi politik dan transparansi dalam pelaporan hasil reses. Penggunaan media digital dan teknologi informasi dapat menjadi solusi untuk melengkapi pertemuan tatap muka yang terbatas secara waktu dan jangkauan. Dengan sistem penjaringan yang lebih modern dan akuntabel, diharapkan setiap aspirasi masyarakat dapat dikelola secara profesional untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih inklusif. (Nugraha, 2022)

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa DPRD Provinsi Sumatera Utara telah menjalankan peran strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui mekanisme reses formal dan dialog informal, namun efektivitas realisasinya masih menghadapi tantangan besar berupa keterbatasan anggaran daerah dan kendala waktu pelaksanaan. Meskipun aspirasi dominan terkait infrastruktur dan ekonomi telah berhasil dijaring, keberhasilan pengabdian ini sangat bergantung pada pengawalan hasil reses dalam rapat paripurna serta koordinasi yang kuat dengan pihak eksekutif guna memastikan usulan masyarakat bertransformasi menjadi kebijakan publik yang nyata dan tepat sasaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

DPRD Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kegiatan reses sebagai sarana penyerapan aspirasi masyarakat dengan memperkuat partisipasi publik, meningkatkan transparansi tindak lanjut aspirasi, serta mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah.Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah

memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian serta penyusunan artikel jurnal ini. Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara atas keterbukaan informasi dan kerja sama yang diberikan selama proses pengumpulan data.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, W., & Febrian, R. A. (2025). Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Dalam Upaya Pembangunan Daerah Melalui Pokok-Pokok Pikiran *. *JMP: Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, *2*(4), 577–589. https://doi.org/https://doi.org/10.25299/JMP.2025.24153

Dilla, I. U., Nasution, M. A., & Suriadi, A. (2020). Efektivitas Program Reses Dprd Kota Medan Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Medan Labuhan. *Governance : Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, *6*(4), 141–145. https://doi.org/https://doi.org/10.56015/governance.v6i4.61 EFEKTIVITAS

Hamidin, N., Mustafa, L. O., & Ramayana, W. O. S. (2024). Peran Reses DPRD dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat : Studi di Lakudo , Buton Tengah. *JAPMAS: Jurnal Politik Dan Demokrasi*, *2*(2), 107–126.

Kurniasih, D., & Rusfiana, Y. (2021). Fungsi Reses Anggota Dprd Dalam Mengartikulasikan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung. *Jurnal Academia Praja*, *4*(2), 380–395.

Nugraha, A. H. (2022). Peranan Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Gerindra dalam Mengupayakan Aspirasi Masyarakat. *JURNAL EMAK : Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan*, *3*(3), 815–818. https://doi.org/https://doi.org/10.53697/emak.v3i3 ARTICLE

Susanto, H., Ernungtyas, N. F., Prisanto, G. F., & Afriani, A. L. (2021). Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Kegiatan Kunjungan Kerja : Studi pada Masyarakat Provinsi Sumatera Utara (SUMUT 1). *Jurnal Representame*, *7*(1), 39–47.

Wenas, E. S., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota Dprd Kota Tomohon. *Jurnal Governance*, *1*(2), 1–11.